

Reshuffle dan Komunikasi Politik Menteri

Harliantara,

Dosen Universitas Sangga Buana Bandung

Rencana reshuffle Kabinet Kerja Jilid II yang berlarut-larut menyebabkan konstelasi politik tidak menentu. Sebelum melakukan reshuffle kabinet Jilid II Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya politik kerja bagi segenap anggota kabinet dan pejabat negara. Politik kerja menjauhkan diri dari wacana dan membutuhkan kerja detail serta sinergitas yang berlandaskan jiwa kebangsaan gotong royong.

Reshuffle jilid II juga untuk menghilangkan timbulnya turbulensi komunikasi kabinet akibat beda pendapat yang terlalu tajam terkait program atau proyek. Setelah reshuffle jilid II komunikasi politik para menteri harus lebih cerdas. Selain itu tidak boleh terjadi gangguan relasional antara media masa dengan kementerian.

Kandungan informasi yang diberikan oleh humas kementerian sebaiknya tidak sebatas memperkenalkan wawasan serta pendapat sang menteri dalam framing kecap cap jempol, tetapi harus juga diimbangi dengan framing yang menjadi masalah pelik yang sebenarnya. Saatnya humas kementerian menjelaskan secara mendalam suatu kebijakan atau peristiwa yang terjadi dan sudah diberitakan kulit-kulitnya oleh media. Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang membiaskan persepsi publik merupakan salah satu contoh bahwa kementerian terkait lambat memberikan penjelasan mendalam.

Yang harus selalu di atas para menteri adalah kemampuan untuk menerjemahkan dan mengelaborasi visi dan gagasan-gagasan Presiden. Mengelaborasi visi, ide dan kebijakan Presiden, kemudian mengkomunikasikannya kepada rakyat luas untuk periode saat ini memang sangat pelik. Namun bisa lebih pelik lagi dari sisi kepentingan rakyat luas, jika menteri terperosok untuk meladeni jabatan pihak lain yang memelintir pernyataan Presiden.

Gaya komunikasi para menteri diharapkan tidak bersifat liberal, tetapi harus senantiasa menekankan nilai tradisi ke-Indonesiaan yang telah membumi berabad-abad, yakni gotong royong agar energi kolektif kebangsaan untuk bergotong royong bisa terakselerasi dengan baik untuk hadapi persaingan global.

Para menteri harus memiliki karakter

walk the talk alias satunya kata dengan perbuatan. Karakter tersebut akan memperhebat jiwa gotong royong dalam Kabinet Kerja. Gotong-royong merupakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantumembantu bersama.

Publik berharap harap cemas menunggu reshuffle kabinet jilid II. Apakah sosok menteri seperti Rizal Ramli yang selama ini dituding tukang bikin gaduh masih dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Selama ini sebenarnya Rizal Ramli yang berlatar belakang aktivis LSM dan intelektual publik memberikan pencerahan kepada publik terkait kebijakan pemerintahan yang sangat penting untuk masa depan. Kegaduhan yang ditimbulkan adalah kegaduhan yang substansial dan esensial yang perlu diketahui dan dipahami oleh rakyat luas.

Kegaduhan tak selalu negatif

Misalnya terkait dengan pilihan teknologi terhadap pengelolaan megaproyek migas Blok Masela. Dalam kaitan di atas, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal

bisa membangun industri papad dan petrokimia. Indonesia bisa dapat sekitar US\$ 6,5 miliar tiap tahun. Nilai tambahnya lebih dari dua kali lipat dibanding ekspor LNG kalau kilang berada di laut. Selain itu multiplier effect yang akan dihasilkan lebih besar dengan skema onshore karena bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja nasional.

Tidak selamanya kegaduhan itu bernilai kelabu, namun juga bisa mencerahkan persepsi publik. Oleh sebab itu rakyat masih berharap agar Presiden Jokowi masih mempertahankan sosok Rizal Ramli sebagai pembantunya. Karena rakyat menilai, Rizal Ramli adalah menteri yang berbekal seribu akal sehingga bisa lebih cepat dan lebih detail. Hal itu terbukti dengan keberhasilannya yang memperbaiki dwelling time atau waktu bongkar muat dan pengurusan di pelabuhan menjadi lebih singkat setara dengan negara tetangga.

Dalam hal mahzab ekonomi, Rizal Ramli memiliki ideologi dan teori yang klop dengan paham Trisakti yang digarisakan oleh Bung Karno serta Nawu Cita yang diusung oleh Presiden Jokowi. Teori Rizal Ramli tersebut menyatakan bahwa selama ini terjadi struktur ekonomi gelas anggur yang merupakan hasil kebijakan ekonomi Orba dan baby Orba selama 40 tahun terakhir. Di bagian atas gelas anggur dikuasai oleh kelompok bisnis besar dan BUMN yang tidak efisien dan kebanyakan jago kandang sehingga sering menjadi beban atau liability negara.

Pegangan gelas anggur tersebut sangat tipis, yang menunjukkan kecilnya golongan menengah dan usaha skala menengah yang independen. Bagian bawah dari gelas anggur tersebut sangat besar yang menunjukkan puluhan juta usaha kecil dan ekonomi rakyat. Negara selama ini selalu memanjakan bagian atas dari gelas anggur dan mengabaikan lapisan bawah, yang struktur ekonominya super-kompetitif dan margin keuntungannya sangat tipis. Struktur gelas anggur yang sangat timpang tersebut sangat tidak adil.

Struktur yang sangat tidak adil tersebut harus diubah menjadi struktur piramida. Indonesia memerlukan usaha skala besar tetapi bukan sekadar jago kandang tetapi juga jago dunia, yang kompetitif di dunia internasional dan mampu membawa nilai tambah di pasar internasional ke dalam negeri. Transformasi dari jago kandang menjadi jago dunia memerlukan kebijakan yang koheren.

Ramli "ngotot" menggunakan skema pengelolaan kilang gas di darat atau onshore. Hal itu bertolak belakang dengan Menteri ESDM yang juga "ngotot" menggunakan skema offshore, yakni kilang gas di laut.

Setelah terjadi dinamika perbedaan pendapat yang oleh lawan politik disebut sebagai kegaduhan, maka Presiden Jokowi memutuskan skema onshore karena aspek sumber daya alam migas tidak hanya digunakan untuk sumber devisa semata, tapi juga harus memiliki industri turunan dan manfaat lainnya. Karena skema offshore atau kilang terapung di laut hanya akan memberikan sumber devisa sebesar US\$ 2,62 miliar tiap tahun. Tapi, dengan skema onshore, pemerintah

